
PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA DALAM LINTASAN SEJARAH (Perspektif Kerajaan Islam)

Aisyah Nursyarief

Pendidikan dan Keguruan UIN Alauddin Makassar

Jl. St. Alauddin No. 63 Makassar

Email: chachanursyarief@gmail.com

Abstrak:

Sejarah pendidikan Islam hakikatnya sangat berkaitan dengan sejarah Islam sehingga periodisasi sejarah pendidikan Islam berada dalam periode-periode sejarah Islam itu sendiri, yaitu periode klasik, pertengahan, dan modern. Di Indonesia, periode tersebut dapat dibagi dikelompokkan ke dalam: fase datangnya Islam, fase perkembangan dan berdirinya kerajaan Islam, fase kedatangan orang Barat, fase penjajahan Jepang, fase kemerdekaan, dan fase pasca kemerdekaan. Dalam setiap fase itu, pendidikan Islam berkembang dengan ciri yang berbeda-beda. Meskipun demikian, pada setiap fase perkembangan pendidikan Islam tersebut, corak dakwah atau Islamisasi senantiasa melekat yang berfungsi - mempertahankan dan mentransformasi nilai-nilai keislaman di dalam penyelenggaraan pendidikan.

Abstract:

The history of Islamic education actually closely related with the Islamic history. Therefore, the period of Islamic educational history are within the periods of Islamic education itself, they are the classic, middle, and modern periods. In Indonesia, those periods can be classified into: the coming of Islam phase, the development phase, the establishment of Islamic kingdom phase, the coming of Western people phase, the Japanese colonial phase, the independent phase and the post-independent phase. Every phases of Islamic education developed different characteristic. However, in every phase of the development of Islamic education, the characteristic of dakwah and Islamization always covered the function of defence, and transformation of Islamic values in the practice of education.

Kata kunci:

Pendidikan, Periode Sejarah, Dakwah, dan Keislaman

PENDIDIKAN Islam merupakan usaha dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, menyampaikan ajaran, memberi contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi motivasi, dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi muslim.¹ Dasar terpenting dari pendidikan Islam adalah Alquran, hadis, dan ijtihad.² Menetapkan Alquran dan hadis sebagai dasar pendidikan Islam bukan hanya karena kebenaran dari perspektif keimanan semata, melainkan juga kebenaran keduanya telah dapat dibuktikan oleh akal berdasarkan sejarah dan pengalaman manusia.

Sejarah pendidikan Islam hakikatnya sangat berkaitan dengan sejarah Islam. Oleh karena itu, periodisasi sejarah pendidikan Islam berada dalam periode-periode sejarah Islam itu sendiri. Secara garis besar, Harun Nasution membagi sejarah Islam

ke dalam tiga periode sebagaimana yang dikutip oleh Zuhairini *et al.*, yaitu periode klasik, pertengahan, dan modern. Kemudian perinciannya dibagi lima periode, yaitu: periode Nabi Muhammad saw., periode *khulafā' al-rāsyidīn*, periode Daulah Bani Umayyah, periode kekuasaan Abbasiyah, dan periode jatuhnya kekuasaan khalifah di Baghdad.³

Pada seminar masuknya Islam di Indonesia yang diselenggarakan di Medan, salah satu hasilnya menyatakan bahwa Islam pertama kali datang di Indonesia pada abad ke-7 M/1 H oleh para pedagang dari Arab.⁴ Jika dilihat dari periodeisasi sejarah Islam, Islam masuk ke Indonesia pada periode Nabi Muhammad saw. yaitu pada abad ke-7 M. Namun, ini belum dapat menjelaskan tentang awal pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia tentu muncul pada awal penyiaran atau datangnya para mubalig untuk berdakwah di Nusantara. Sebab, harus dapat dibedakan antara datangnya orang Islam pertama di Indonesia dengan permulaan penyiaran Islam di Indonesia.

Beberapa pendapat tentang jauhnya rentang waktu antara masuknya orang Islam pertama di Indonesia dengan penyiaran agama Islam pertama di Indonesia karena pembawa Islam pertama di Indonesia adalah pedagang, bukan para tentara atau pelarian politik, sehingga mereka tidak langsung mendirikan kerajaan Islam. Selain itu, telah ada kerajaan Hindu-Budha yang telah berdiri dan berkuatan besar.⁵

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia jika dikaitkan dengan sejarah Islam di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam fase-fase berikut: fase datangnya Islam ke Indonesia, fase berkembangnya melalui proses adaptasi, fase berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, fase kedatangan orang Barat, fase penjajahan Jepang, fase Indonesia merdeka, dan fase pembangunan.⁶ Namun, penulis hanya memetakan pendidikan Islam di Indonesia ke dalam tiga garis besar yaitu sebelum penjajahan, masa penjajahan, dan setelah kemerdekaan.

Untuk melihat sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, maka pembahasan ini akan difokuskan pada: 1) gambaran pendidikan Islam sebelum penjajahan; 2) eksistensi pendidikan Islam pada masa penjajahan; dan 3) realitas pendidikan Islam pasca kemerdekaan.

PEMBAHASAN

Gambaran Pendidikan Islam sebelum Masa Penjajahan

Sejak awal berkembangnya Islam, pendidikan menjadi prioritas utama masyarakat muslim Indonesia. Islamisasi menjadi alasan utama melaksanakan pengajaran Islam walaupun dengan cara yang sangat sederhana. Kebutuhan masyarakat Islam dengan pendidikan mendorong masyarakat Islam Indonesia mengadopsi dan mentransfer lembaga keagamaan dan sosial yang sudah ada ke dalam lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Di Jawa, umat Islam mentransfer lembaga keagamaan Hindu-Budha menjadi pesantren. Umat Islam Minangkabau mengambil alih surau yang merupakan peninggalan adat masyarakat setempat menjadi lembaga pendidikan Islam dan di Aceh *meunasah* ditransfer menjadi lembaga pendidikan Islam.⁷

Adanya Islamisasi dan pendidikan Islam yang sangat pesat di Nusantara pada saat itu berhasil membentuk masyarakat Islam yang mendorong lahirnya kerajaan Islam di Nusantara. Beberapa kerajaan Islam pada masa sebelum zaman penjajahan adalah: Pertama, Kerajaan Perlak, Kerajaan Pasai, Kerajaan Aceh, dan Kerajaan Siak di Sumatera. Kedua, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan Mataram di Jawa. Ketiga, Kerajaan kembar Gowa-Tallo di Sulawesi Selatan.

Kerajaan Islam di Sumatra

Pertama: Kerajaan Perlak

Kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah Kerajaan Islam Perlak yang berdiri pada tahun ke-3 H/abad ke-9 M.⁸ Kerajaan Perlak sebagai kerajaan Islam pertama giat melaksanakan pengajian dan pendidikan Islam. Belum didapatkan data bagai mana pendidikan Islam dilangsungkan, tetapi diduga besar pendidikan dilangsungkan di masjid istana bagi keluarga pembesar, di masjid-masjid, dirumah-rumah, serta surau-surau bagi masyarakat umum. Materi pembelajaran pendidikan Islam dibagi menjadi dua tingkatan: pertama yaitu tingkat dasar yang terdiri atas pelajaran membaca, menulis, bahasa Arab, pengajian alquran, dan ibadah praktis. Kedua yaitu tingkat yang lebih tinggi dengan materi-materi ilmu fikih, tasawuf, ilmu kalam, dan lain sebagainya.⁹

Tidak terlalu banyak sumber yang menjelaskan geliat perkembangan sistem pendidikan Islam pada kerajaan ini. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena kerajaan ini berdiri pada awal datangnya Islam. Menurut beberapa sumber, data yang didapatkan hanya menceritakan geliat dakwah dan penyiaran Islam di kerajaan tersebut.

Rajanya yang keenam bernama Sultan Mahdum Alaudin Muhammad Amin, terkenal sebagai Sultan yang arif bijaksana lagi alim. Beliau adalah seorang ulama yang mendirikan perguruan tinggi Islam. Lembaga majelis taklim tinggi yang dihadiri khusus oleh para murid yang sudah alim. Lembaga tersebut juga mengajarkan dan membacakan kitab-kitab agama yang berbobot pengetahuan tinggi, misalnya kitab *al-Umm* karangan Imam Syafi'i.¹⁰

Kedua: Kerajaan Pasai

Kerajaan Pasai diperkirakan berdiri pada awal atau pertengahan abad ke-13 M sebagai hasil islamisasi daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang muslim sejak abad ke-7 M. Para ahli sejarah umumnya berpendapat bahwa pendiri kerajaan ini adalah Sultan Malik al-Saleh.¹¹ Menurut keterangan Ibnu Batutah yang singgah di Kerajaan Pasai pada tahun 1345 M dalam misinya mengelilingi dunia, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan yang berlaku di Kerajaan Pasai adalah: materi pendidikan dan pengajaran agamanya bermazhab Syafi'i.; sistem pendidikannya informal berupa majlis taklim dan halakah; tokoh pemerintahan merangkap ulama; biaya pendidikan bersumber dari negara.¹²

Ketiga: Kerajaan Aceh

Kerajaan Aceh Darussalam yang diproklamasikan pada 12 Zulkaedah 1916 H (1511 M) menyatakan perang terhadap buta huruf dan buta ilmu. Para sultan Aceh

sangat mencintai ilmu dan ulama.¹³ Hal ini sejalan dengan wahyu pertama yang memerintahkan kepada manusia untuk membaca dan menuntut ilmu pengetahuan. Mungkin hal inilah yang menjadi dasar dari pemberantasan buta ilmu dan buta huruf pada masa itu. Agama dan pengetahuan mendalam tentang agama yang dianutnya menjadi tolok ukur pada masa itu, tanpa memandang asal negara dan bangsanya.

Lembaga pendidikan yang merupakan pusat pengembangan pendidikan Islam di Kerajaan Aceh adalah: *Balai Seutia Hukama*, Lembaga ilmu pengetahuan, tempat berkumpulnya para ulama, ahli pikir dan cendekiawan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Departemen yang mengurus masalah pendidikan dan pengajaran disebut *Balai Jamaah Himpunan Ulama*, yaitu kelompok studi para ulama untuk bertukar pikiran membahas persoalan-persoalan pendidikan.¹⁴

Jenjang dan struktur pendidikannya pun sudah tersusun sebagaimana lembaga pendidikan formal saat ini. Jenjang pendidikannya yaitu:

- a. *Meunasah* (madrasah), terdapat di kampung dan berfungsi seperti sekolah dasar. Materi yang diajarkan meliputi menulis dan membaca huruf Arab, ilmu agama, bahasa melayu, akhlak, dan sejarah Islam;
- b. *Rangkang*, setingkat madrasah tsanawiyah. Jenjang pendidikan ini diselenggarakan di tiap mukim. Materi yang diajarkan adalah bahasa Arab, ilmu bumi, sejarah, ilmu hisab, akhlak, dan lain-lain;
- c. *Dayah*, terdapat di daerah Ulubalang setingkat madrasah aliyah. Terkadang dilaksanakan di masjid, materi yang diajarkan bahasa Arab, fikih, tauhid, tasawuf, ilmu bumi, sejarah dan tata negara, ilmu pasti, dan faraid;
- d. *Dayah* Teuku Cik, disamakan dengan perguruan tinggi. Pada jenjang ini diajarkan fikih, tafsir, hadis, tauhid, ilmu bahasa dan sastra Arab, sejarah dan tata negara, mantik, ilmu falak, dan filsafat.¹⁵

Keempat: Kerajaan Siak

Islam pertama kali masuk ke Siak (Riau) diperkirakan tahun 12 M. Hal ini dapat dilihat dari peninggalan kuburan bercorak Islam, Nizamuddin al-Kamil, seorang laksamana dari Dinasti Fatimiyah yang bertahun 1128 M.¹⁶ Pendidikan di Kerajaan Siak berkembang sangat pesat pada masa Sultan Syarif Kasim II. Beliau merupakan figur tokoh yang sangat elok. Di masa pemerintahannya, beliau mendirikan sekolah-sekolah seperti: H.I.S pada tanggal 15 September 1915 untuk seluruh penduduk Kesultanan Siak, tahun 1917 beliau membangun Sekolah Agama Islam, Madrasah Taufiqiah Al-Hasyimah, Madrasah Annisa' (khusus wanita), mendirikan sekolah latihan untuk wanita, dan mendirikan asrama pelajar.¹⁷

Kerajaan Islam di Jawa

Pertama: Kerajaan Demak

Kerajaan Demak berdiri kurang lebih setengah abad, antara tahun 1500-1550. Raja pertamanya adalah Raden Fatah.¹⁸ Awalnya, Raden Fatah adalah santri perguruan Islam di Ampel Denta. Setelah mendapatkan ijazah beliau mendirikan pesantren di Glangan Arum. Di sanalah terbentuk Bayangkara Islah yang akan mendukung pendidikan dan pengajaran Islam.¹⁹

Proses pendidikan Islam di Kerajaan Demak beriringan dengan kegiatan dakwah Islam yang dilakukan oleh para wali, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Drajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati.²⁰

Dalam melakukan tugas pendidikan Islam kepada masyarakat, para wali menggunakan masjid sebagai sarana pengembangan pendidikan Islam. Masjid Agung Demak adalah Masjid tertua di pulau Jawa yang menjadi pusat dan lambang kerajaan. Selain sebagai tempat ibadah, masjid Agung Demak juga digunakan sebagai pusat bertukar pendidikan Islam. Selain di masjid Agung, pendidikan agama juga diadakan di masjid-masjid umum. Masjid-masjid ini dipimpin oleh seorang badal yang ditugaskan oleh kerajaan. Badal kemudian digelar Kyai Ageng yang bertugas menjadi seorang guru. Pendidikan agama yang dilaksanakan di masjid-masjid diperuntukkan bagi masyarakat umum, sementara keluarga kerajaan belajar agama secara langsung dari wali-wali yang digelar sunan, baik di istana maupun di rumah para wali.²¹

Kedua: Kerajaan Pajang

Perpindahan kekuasaan Kesultanan Demak ke Pajang tidak membawa perubahan berarti terhadap sistem pengajaran dan pendidikan Islam.²²

Kedua: Kerajaan Mataram

Dalam bidang pendidikan, Kerajaan Islam Mataram membuat beberapa ketentuan khusus, yaitu setiap desa harus menyediakan beberapa tempat pengajian Alquran. Di tempat itulah, diajarkan huruf hijaiyah, barazanji, dan dasar-dasar keislaman lainnya seperti praktik ibadah, rukun iman, dan rukun Islam. Selain itu, pihak kesultanan menghimbau kepada para orang tua agar memerintahkan anak-anak mereka yang telah berusia 7 tahun agar belajar mengaji.²³

Kerajaan Islam Gowa-Tallo di Sulawesi Selatan

Kerajaan pertama di Sulawesi Selatan adalah kerajaan kembar Gowa-Tallo pada tahun 1605 M. Rajanya ikut masuk Islam bernama I Mallingkang Daeng Manyonri bergelar Sultan Abdullah Awwalul Islam. Disusul kemudian oleh I Mangnga'rangngi Daeng Manrabia juga mengucapkan syahadat dan bergelar Sultan Alauddin. Dalam waktu dua tahun, seluruh rakyatnya telah memeluk Islam. Mubalig yang berjasa atas penyebaran Islam di sana adalah Abdul Qadir Kkatib Tunggal bergelar Datok Ribandang yang berasal dari Minangkabau.²⁴

Seperti halnya kerajaan Islam pada umumnya, masjid menjadi pusat pengembangan agama Islam di Sulawesi Selatan. Pada masa pemerintahan raja Gowa ke-15 (1637-1653), Sultan Malikussaid (I Mannuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiung), tiap-tiap negeri memiliki masjid dan di tiap-tiap kampung memiliki *langgara'*. Selain sebagai tempat ibadah, masjid dan langgar juga digunakan sebagai tempat pengajian agama bagi anak-anak muda di tempat itu. Guru yang mengajarkan Alquran dan ilmu-ilmu Islam lainnya disebut *anrong-gurunta* atau *gurunta*.²⁵

Selain itu, penulisan dan penyalinan buku-buku agama Islam dari bahasa Melayu ke bahasa Makassar giat dilaksanakan. Berbagai lontara yang asalnya dari bahasa Melayu diduga berasal dari zaman permulaan perkembangan Islam di Sulawesi

Selatan (abad ke-17 dan 18) yang sampai saat ini masih populer di kalangan orang tua-tua Bugis-Makassar. Lontara yang dimaksud antara lain: (1) Lontara perkawinan antara Sayidina Ali dengan Fatimah, putri Rasulullah, (2) Lontara Nabi Yusuf dan percintaan Laila dan Majnun, (3) *Sura' Bukkuru* yang dalam bahasa Bugis dikenal dengan lontara *Pau-paunna Sultanul Injilai*, (4) Budi Istihara, (5) *Kitta' Faraid* (Kitab Hukum Pewarisan), (6) *Kitta' Nika* (Kitab Hukum Perkawinan), (7) *Lontara'na Sehe Maradang*, (8) Lontara tentang peperangan Nabi Muhammad dengan raja Hindi, (9) Berbagai mukjizat Nabi Muhammad, dan (10) Lontara tentang wewenang *kali* (kadhi) menurut *sara'* dan banyak yang lain.²⁶

Eksistensi Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan

Pendidikan Islam Masa Kolonial Belanda

Kondisi pendidikan Islam pada zaman Belanda sangat memprihatinkan. Umat Islam terus-menerus mendapatkan tekanan dan perlakuan yang tidak menggembirakan. Namun, umat Islam pantang menyerah, tetap berjuang hingga akhirnya pendidikan Islam mengalami kebangkitan dan kemajuan.²⁷

Kemajuan pendidikan tersebut terinspirasi oleh gerakan yang lahir di Timur Tengah, khususnya Mesir dan Saudi Arabiyah oleh orang-orang yang pulang dari menuntut ilmu di kedua negara tersebut.²⁸ Munculnya gerakan-gerakan tersebut menyebabkan pendidikan Islam bergerak ke arah yang lebih maju walaupun di sisi lain pemerintah kolonial tidak mendukungnya. Usaha tersebut tidak bisa dikatakan gagal, karena banyaknya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bermunculan yang merupakan pembaruan pendidikan Islam pada masa itu.

Pertama: Jamiat Khair, Konsep Pendidikan Konfergensi

Al-Jamiatul Khairiyah yang lebih dikenal dengan Jamiatul Khair didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905.²⁹ Organisasi ini membangun lembaga pendidikan walaupun bercorak Islam, tapi merupakan gabungan antara sistem pendidikan Islam dan model Barat. Pelajarannya tidak semata-mata bersifat agama, tetapi diterapkan juga kurikulum berhitung, sejarah, ilmu bumi dengan bahasa pengantar bahasa Melayu. Bahasa Inggris merupakan bahasa wajib pengganti bahasa Belanda. Sedangkan pelajaran bahasa Arab sangat ditekankan sebagai alat untuk memahami sumber-sumber Islam.³⁰

Kedua: Taman Siswa

Taman siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta.³¹ Konsep pendidikan Taman Siswa meliputi:

- a. Sistem among. Sistem ini didasarkan pada: a) kodrat hidup anak, kodrat anak ini terwujud sebagai bakat anak. Pendidik dalam hal ini harus bertindak seperti "pamong". Hal tersebut dilakukan dengan berdiri di belakang anak, tetapi tetap memengaruhi dengan memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan diri. Pendidik baru turun tangan bila anak memang perlu bimbingan dan tuntunan agar anak tidak menyimpang. Inilah maksud dari semboyan Ki Hajar Dewantara yang sering disebut dengan "*Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangunkarso, Tut*

Wuri Handayani"; b) dasar yang kedua yaitu kemerdekaan, bahwa peserta didik harus diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Anak didik untuk mengembangkan cipta, rasa, dan karsanya sendiri.³²

- b. Teori Tri Pusat Pendidikan. Dalam penafsirannya mengenai pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengungkapkan adanya Tri Pusat Pendidikan, yaitu pendidikan dapat diperoleh melalui tiga tempat yaitu: dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.³³
- c. Kebudayaan Nasional. Bahan pengajaran dan kurikulum didasarkan dan digali dari kebudayaan nasional, pendidikan budi pekerti mendapat perhatian yang lebih besar karena merupakan proses awal pembentukan watak kepribadian anak. Untuk pendidikan budi pekerti ini, dapat ditempuh melalui pendidikan formal (etika), pendidikan agama, dan pelajaran kesenian. Oleh karena itu, pelajaran kesenian juga mendapatkan perhatian yang besar. Yang dimaksud kesenian di sini adalah segala macam bentuk kesenian nasional.³⁴

Ketiga: Indonesisch Nederland School

Mohamad Syafei mendirikan sekolah INS (*Indonesisch Nederlandse School*) di Sumatra Barat pada tahun 1926. Tujuannya adalah mendidik anak-anak agar dapat berdiri sendiri atas usaha sendiri dengan jiwa yang merdeka.³⁵ Pendidikan yang diberikan adalah pendidikan teori dan pendidikan praktik. Materi yang diberikan bervariasi sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Untuk tingkat ruang rendah, teori 75 % dan praktik 25 %. Sedangkan untuk tingkat ruang dewasa masing-masing 50 %, sehingga para pengamat cenderung untuk menggolongkan INS sebagai sekolah kerja (*doesschool*). Tujuan utamanya pendidikan dan pengajaran berdasarkan prinsip aktif dengan mengutamakan peranan pekerjaan tangan.³⁶

Keempat: Muhammadiyah

Organisasi ini didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan tanggal 20 November 1921 di Yogyakarta.³⁶ Adapun pembaruan yang dilaksanakan Muhammadiyah adalah dengan melakukan modernisasi pesantren. Setelah berdiri selama delapan tahun, Muhammadiyah mendirikan dua macam lembaga pendidikan, yaitu *Madrrasah Diniyah* yang hanya memberikan pelajaran agama dan sekolah yang memberikan pelajaran agama dan pelajaran umum. Modernisasi yang kedua adalah mendirikan sekolah model Belanda, namun tetap menjadikan pelajaran agama Islam sebagai kurikulum wajibnya.³⁸

Kelima: Persatuan Islam

Persatuan Islam (PERSIS) didirikan secara resmi pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok orang Islam yang berminat dalam studi dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Zamzam dan Muhammad Yunus. Berbeda dengan organisasi lain yang berdiri pada awal abad ke-20, PERSIS mempunyai ciri khas tersendiri di mana organisasi ini di samping sebagai organisasi pendidikan, juga dititikberatkan pada pembentukan faham keislaman. Di dalamnya, Muhamad Natsir menerapkan ide pembaruannya yang disebut pendidikan integralistik. Sistem pendidikan terpadu yang tidak memisahkan pengetahuan agama dan umum.³⁹

Pendidikan Islam Zaman Penjajahan Jepang

Kehadiran Jepang menjajah Indonesia sangatlah singkat. Namun, Jepang tetap memberikan pengaruh terhadap perkembangan pendidikan Islam. Salah satunya adalah umat Islam lebih leluasa mengembangkan pendidikannya karena peraturan pemerintah Belanda yang diskriminatif tidak diberlakukan lagi. Selanjutnya, sistem pendidikan Islam saat itu masih sama dengan sistem zaman Belanda, yaitu di samping sistem pendidikan pesantren, juga terdapat sistem pendidikan klasikal, yaitu sistem pendidikan Belanda yang memuat pelajaran agama.⁴⁰

Di tahun-tahun awal penjajahannya, Jepang bahkan menampakkan diri seolah-olah membela kepentingan Islam. Ini merupakan siasat untuk kepentingan Perang Dunia II. Mereka menempuh kebijakan di antaranya:

- a. Kantor Urusan Agama yang pada zaman Belanda disebut *Kantoor Voor Islamistische Zaken* dipimpin oleh orang-orang orientalis Belanda, diubah menjadi *Sumubi* yang dipimpin oleh ulama Islam sendiri, yaitu K.H. Hasyim Asy'ari dari Jombang;
- b. Beberapa pondok pesantren besar sering dikunjungi Jepang dan mendapat bantuan;
- c. Sekolah negeri mendapat pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran Islam;
- d. Jepang juga mengizinkan pembentukan barisan *Hisbullah* untuk memberikan latihan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam;
- e. Mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Bung Hatta;
- f. Para ulama Islam bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin nasionalis diizinkan membentuk barisan *Pembela Tanah Air (Peta)*. *Pembela Tanah Air* inilah yang menjadi cikal bakal TNI saat ini;
- g. Umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut *Majelis A'la Indonesia (MAI)* yang bersifat kemasyarakatan.⁴¹

Walaupun Jepang berusaha mengambil hati umat Islam dengan memberikan kebebasan dalam melaksanakan praktik agama dan mengembangkan pendidikan, ulama tidak semudah itu tunduk kepada pemerintah Jepang apabila hal tersebut bertolak belakang dengan akidah Islam. Misalnya perjuangan K.H. Ahmad Dahlan dan para santri dalam menentang kebijakan kufur pemerintah Jepang yang memerintahkan setiap orang untuk menghadap ke Tokyo setiap pukul 07.00 untuk menghormati kaisar Jepang yang mereka anggap keturunan Dewa Matahari. Akibat sikap tersebut beliau ditangkap dan dipenjarakan Jepang selama 8 bulan.⁴²

Realitas Pendidikan Islam Pascakemerdekaan

Pendidikan Islam Masa Orde Lama

Orde Lama merupakan istilah untuk menyebut zaman kepemimpinan Soekarno yang dimulai pada tahun 1945 sampai beliau digantikan oleh Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1965.⁴³ Jadi, Orde Lama merupakan masa-masa awal kemerdekaan Indonesia. Rakyat baru saja merasakan terlepas dari penjajahan yang membelenggu-

nya selama beberapa abad. Tentu banyak rencana yang tersusun menjadikan seperti apa Indonesia selanjutnya.

Salah satu yang dilakukan pemerintah pada saat itu adalah membentuk dan mengisi struktur pemerintahan negara dengan mendirikan departemen di segala bidang yang akan memperjuangkan cita-cita kemerdekaan. Untuk kepentingan agama dan pendidikannya, pemerintah mendirikan Departemen Agama. Kepentingan pendidikan secara umum ditangani oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.⁴⁴

Besarnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan Islam menandakan bahwa pendidikan Islam masa ini telah jauh berbeda bila dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda dan Jepang. Setidaknya pada masa ini pendidikan Islam sudah tidak termarginalkan lagi.⁴⁵ Setidaknya ada beberapa sumbangan pemerintah Orde Lama terhadap kemajuan pendidikan Islam di Indonesia.

Pertama, urusan keagamaan dan pendidikan agama yang pada masa penjajahan Belanda bernama *Kantoor Voor Islamistische Zaken* dan pada masa penjajahan Jepang bernama *Shumuka*. Setelah Indonesia merdeka diganti menjadi Kementerian Agama yang diresmikan pada 3 Januari 1946.⁴⁶

Kedua, mengeluarkan sejumlah perundang-undangan dan peraturan yang berhubungan dengan pendidikan agama. Di antaranya:

- a. Peraturan bersama dua menteri yaitu: Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama mulai dilaksanakan kelas IV SR sampai kelas VI.⁴⁷
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 yang mengatur pendidikan agama di sekolah, baik yang ada di Kementerian Agama, maupun yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.⁴⁸
- c. 20 Januari 1951 ditandatangani peraturan bersama Menteri PP&K (Nomor K/652) dengan Menteri Agama (Nomor 1432). Isinya adalah: (1) pendidikan agama mulai diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat; (2) di daerah-daerah yang keagamaannya kurang kuat (misalnya di Sumatra, Kalimantan, dan lain-lain), pendidikan Agama diberikan mulai kelas 1 SR dengan catatan pelajaran pengetahuan umum tidak berkurang jika dibandingkan dengan sekolah yang pendidikan agamanya mulai kelas IV SR; (3) di sekolah lanjutan pertama dan tingkat atas (umum dan kejuruan), diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu; dan (4) pendidikan agama kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua/walinya.⁴⁹

Ketiga, memberikan perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah dan pesantren, pembinaan dan pengembangannya diserahkan kepada Departemen Agama. Berkaitan dengan hal tersebut, Departemen Agama menetapkan beberapa kebijakan: (1) memberi pelajaran agama di sekolah negeri dan partikular; (2) memberi pengetahuan umum di madrasah; dan (3) mendirikan Sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN).⁵⁰

Keempat, memberikan bantuan fasilitas dan sumbangan material kepada lem-

bagaimana lembaga pendidikan Islam, seperti mengangkat guru agama, membantu biaya pembangunan madrasah, bantuan buku-buku pelajaran, menegerikan madrasah, dan bantuan lainnya.⁵¹

Pendidikan Islam Masa Orde Baru

Orde Baru secara harfiah adalah masa yang baru yang menggantikan masa kekuasaan Orde Lama. Namun secara politis, Orde Baru diartikan suatu masa untuk mengembalikan negara Republik Indonesia ke dalam sebuah tatanan yang sesuai dengan haluan negara sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta falsafah negara Pancasila secara murni dan konsekuen.⁵²

Pada masa Orde Baru, pendidikan agama telah mengalami kemajuan sesuai dengan keputusan sidang MPRS tahun 1966. Dengan demikian, sejak tahun 1966 pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi Umum Negeri di seluruh Indonesia.⁵³ Adapun kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru adalah:

Pertama, masuknya sistem pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB 3 Menteri), yaitu Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. Untuk merealisasikan SKB 3 Menteri tersebut, pada tahun 1976, Departemen Agama menetapkan kurikulum standar yang dijadikan acuan oleh madrasah. Surat keputusan tersebut juga menetapkan bahwa ijazah madrasah memiliki nilai yang sama dengan nilai ijazah sekolah umum yang setingkat. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas dan siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum yang setingkat. Keberadaan SKB 3 Menteri ini menyebabkan terjadinya perubahan kurikulum madrasah. Kurikulum madrasah yang awalnya 60% agama dan 40% umum berubah menjadi 30% agama dan 70% umum. Walaupun SKB 3 Menteri ini memberikan dampak positif bagi madrasah, tetapi dalam praktiknya masih ada hambatan dan kelemahan yang perlu diatasi, di antaranya: perbandingan pelajaran umum dan agama dengan persentase 70:30 masih menimbulkan reaksi masyarakat sebagai usaha pendangkalan agama di madrasah, tamatan madrasah serba tanggung, pengetahuan agama dan bahasa Arabnya kurang mendalam, input yang kurang baik bagi perguruan tinggi Islam, pengetahuan umumnya pun rendah, menyebabkan mereka kalah bersaing dalam memasuki perguruan tinggi umum. Selain itu, juga timbul keraguan masyarakat tentang kualitas madrasah saat itu jika dibandingkan dengan sebelum SKB 3 Menteri dikeluarkan.⁵⁴

Langkah strategis lainnya dalam pengembangan madrasah setara dengan sekolah umum dapat diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa pendidikan Islam dilaksanakan mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang regulasi, bantuan keuangan, dan sumber

daya manusia.⁵⁵

Kedua, pembaruan madrasah dan pesantren, baik pada aspek fisik maupun non-fisik. Pembaruan aspek fisik dilakukan dengan melengkapi dan meningkatkan infrastruktur, sarana prasarana, dan fasilitas seperti buku, perpustakaan, dan peralatan laboratorium. Aspek nonfisik meliputi pembaruan bidang kelembagaan, manajemen pengelolaan, kurikulum, mutu sumber daya manusia, proses pembelajaran, jaringan teknologi dan informasi, dan sebagainya.⁵⁶

Ketiga, pemberdayaan pendidikan Islam nonformal, di antaranya majlis taklim. Pada masa ini, muncul ribuan majlis taklim yang selanjutnya tergabung dalam Badan Kontak Majlis Taklim (BKMT) mulai dari tingkat pusat sampai kabupaten, kota, dan kecamatan.⁵⁷

Keempat, peningkatan atmosfer dan suasana praktik keagamaan. Pemerintah Orde Baru telah mendukung lahirnya berbagai pranata ekonomi, sosial, budaya, dan kesenian Islam. Lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesi (ICMI), Bank Muamalat Indonesia (BMI), Harian Umum Republika, Bayt Alquran, dan lain-lain. Semua ini merupakan buah dari keberhasilan pembaruan pendidikan Islam.⁵⁷

Pendidikan Islam Masa Reformasi

Era Reformasi dalam istilah lazim yang digunakan di Indonesia adalah masa pemerintahan yang dimulai setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998.⁵⁹ Sejalan dengan berbagai kebijakan yang ada, keadaan pendidikan Islam secara umum jauh lebih baik daripada keadaan pendidikan pada masa pemerintahan Orde Baru. Keadaan pendidikan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, hanya menyebutkan madrasah saja yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pesantren, Ma'had Ali, Raudatul Athfal (taman kanak-kanak), dan majlis taklim telah masuk ke dalam sistem pendidikan nasional.

Kedua, kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan Islam. Kebijakan ini terlaksana dengan ditetapkannya anggaran pendidikan sebanyak 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya termasuk gaji guru dan dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu. Demikian pula pengadaan buku gratis, pengadaan infrastruktur, sarana prasarana, media pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Ketiga, setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal tamat sekolah lanjutan pertama, yakni SMP atau Tsanawiyah yang disebut dengan program wajib belajar sembilan tahun. Program wajib belajar ini bukan hanya berlaku bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Menteri-

an Pendidikan Nasional, melainkan juga bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Sebagai tindak lanjut dari program wajib belajar ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Kepada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan gratis tersebut, telah diberikan biaya bantuan operasional sekolah yang selanjutnya dikenal dengan istilah BOS.

Keempat, penyelenggaraan sekolah bertaraf nasional (SBN) dan internasional (SBI), yaitu pendidikan yang seluruh komponen pendidikannya menggunakan standar nasional dan internasional. Visi, misi, tujuan, kurikulum, proses pembelajaran, sarana prasarana, manajemen pengelolaan, evaluasi, dan lainnya harus berstandar nasional dan internasional.

Kelima, kebijakan sertifikasi guru dan dosen bagi semua guru dan dosen baik negeri maupun swasta, baik guru umum maupun guru agama, baik guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional maupun guru yang berada di bawah Kementerian Agama. Hal ini merupakan program peningkatan mutu guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Untuk mendukung program tersebut, selain pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dan Dosen, juga mengalokasikan anggaran biaya pendidikan sebesar 20% dari total APBN.⁶⁰

Keenam, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK/tahun 2004) dan kurikulum tingkat satuan (KTSP/tahun 2006). Kurikulum ini tidak hanya menuntut peserta didik menguasai pelajaran, melainkan juga dituntut untuk memiliki pengalaman dalam proses mendapatkan pengetahuan tersebut.

Ketujuh, pengembangan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru (*teacher centris*) melalui kegiatan *teaching*, tetapi juga berpusat pada murid melalui kegiatan *learning* (belajar) dan *research* (meneliti). Dengan pendekatan ini, metode yang digunakan dalam proses pembelajaran bukan hanya ceramah, contoh, dan bimbingan, melainkan juga diskusi, seminar, pemecahan masalah, penugasan, dan penemuan.⁶¹

Penerapan manajemen yang berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan (*to give good service and satisfaction for all customers*). Dengan pandangan bahwa pendidikan adalah sebuah komoditas yang diperdagangkan, agar komoditas tersebut menarik minat, maka komoditas tersebut harus diproduksi dengan kualitas yang unggul. Untuk itu, seluruh komponen pendidikan harus dilakukan standarisasi. Standar tersebut harus dikerjakan oleh sumber daya manusia yang unggul, dilakukan perbaikan terus-menerus, dan dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, telah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi Standar Isi (kurikulum), Standar Mutu Pendidikan, Standar Proses Pendidikan, Standar Pendidik dan tenaga kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian.⁶²

SIMPULAN

Pendidikan Islam pada masa sebelum penjajahan ditandai dengan islamisasi yang sangat pesat. Hal tersebut berhasil membentuk masyarakat Islam yang mendorong lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia pada masa sebelum penjajahan.

Pendidikan Islam masa penjajahan terbagi dua, yaitu: pendidikan Islam masa Kolonial Belanda dan pendidikan Islam masa penjajahan Jepang. Walaupun pendidikan Islam masa Kolonial Belanda sangat memprihatinkan, namun gerakan-gerakan pembaruan Islam tetap muncul dan membawa pendidikan Islam ke arah yang lebih baik. Pada masa penjajahan Jepang, umat Islam leluasa mengembangkan pendidikan karena dihapusnya peraturan Belanda yang diskriminatif.

Pendidikan Islam pasca kemerdekaan menunjukkan perkembangan pendidikan Islam yang sangat pesat. Di awal Orde Lama, pendidikan Islam sudah tidak termarginalkan lagi. Pada masa Orde Baru, pendidikan Islam telah masuk kepada sistem pendidikan nasional. Pada masa reformasi, berbagai kebijakan pemerintah yang tidak hanya berlaku bagi lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi juga berlaku pada semua lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama menunjukkan sudah tidak tampaknya dikotomi pendidikan dan diskriminasi pemerintah terhadap pendidikan agama.

CATATAN AKHIR:

1. Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, h. 27.
2. Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhdiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, cet. II; Bandung: Pustaka Setia, 2012, h. 63-91.
3. Zuhairini *et al.*, *Sejarah Pendidikan Islam*, cet. VI; Jakarta: Bumi Aksara, 2000, h. 7.
4. *Ibid.*, h. 133.
5. *Ibid.*, h. 131-132.
6. *Ibid.*, h. 7-8.
7. Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam: Perubahan Konsep, Filsafat, dan Metodologi dari Era Nabi saw. sampai Ulama Nusantara*, cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 2012, h. 219.
8. *Ibid.*, h. 219.
9. Menunggu Asingnya Islam, "Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Islam di Indonesia," Blog SALAAM http://jimmygeneh.blogspot.com/2012/03/pendidikan-islam-pada-masa-kerajaan_13.html. 3 Oktober 2014.
10. Ramayulis, *op. cit.*, h. 221.
11. Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011, h. 236.
12. Zuhairini *et al.*, *op. cit.*, h. 136.
13. Ramayulis, *op. cit.*, h. 223.
14. *Ibid.*, h. 225.
15. *Ibid.*, h. 225-226.
16. *Ibid.*, h. 226.
17. Rahmi Putri Atria, "Pendidikan Sosial Budaya Masyarakat Melayu Riau (Sebuah Warisan Kerajaan Siak Sri Indapura)," *Blog E=MC2*. <http://anjunofarofpki.blogspot.com/2013/07/pendidikan-sosial-budaya-masyarakat.html>. 3 Oktober 2014.
18. Abuddin Nata, *op. cit.*, h. 240-241.

-
19. *Ibid.*, h. 266.
 20. *Ibid.*
 21. Yusran Khaidir al_Lumbuky, "Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Demak," *Blog Arsip Ilmu Pengetahuan*. http://jimmygeneh.blogspot.com/2012/03/pendidikan-islam-pada-masa-kerajaan_13.html. 3 Oktober 2014.
 22. Abuddin Nata, *op. cit.*, h. 268.
 23. *Ibid.*, h. 269.
 24. Ramayulis, *op. cit.*, h. 243.
 25. Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Ujungpandang: Hasanuddin University Press, 1995, h. 29.
 26. *Ibid.*, h. 28
 27. Abuddin Nata, *op. cit.*, h. 288.
 28. *Ibid.*, h. 288.
 29. Hanun Asrorah, *Sejarah Pendidikan Islam*. Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1992, h. 160.
 30. Banten Online, "Pendidikan Islam di Zaman Penjajahan Belanda," *Blog Informasi Banten dan Dunia Pendidikan* <http://ensiklopebanten.wordpress.com/2012/04/16/pendidikan-islam-di-zaman-penjajahan-belanda/> 7 Oktober 2014.
 31. Tashadi *et al.*, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Jogjakarta*. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah: Yogyakarta: h. 65.
 32. Wasty Soemanto, *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional, 1983, h. 68.
 33. *Ibid.*, h. 68.
 34. Siswoyo Wahyudi, *Lintas Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: CV Abadi, 2001, h. 56.
 35. Davi Kurniawan, "Sejarah Tokoh-Tokoh Pendidikan di Indonesia dan Luar Negeri," *Kompasiana.com*, 23 November 2010. <http://sejarah.kompasiana.com/2010/11/23/sejarah-tokoh-tokoh-pendidikan-di-indonesia-dan-luar-negeri-320581.html>. 7Oktober 2014.
 36. *Ibid.*
 37. Ramayulis, *op. cit.*, h. 316.
 38. *Ibid.*, h. 318-319.
 39. *Ibid.*, h. 319-320.
 40. Abuddin Nata, *op. cit.*, h. 308-309.
 41. Zuhairini *et al.*, *op. cit.*, h. 151.
 42. Ramayulis, *op. cit.*, h. 345.
 43. Abuddin Nata, *op. cit.*, h. 313.
 44. *Ibid.*, h. 317.
 45. *Ibid.*, h. 323.
 46. *Ibid.*, h. 318-319.
 47. Samsul Nizar. *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 348.
 48. Abuddin Nata, *op. cit.*, h. 319.
 49. Samsul Nizar, *op. cit.*, h. 349.
 50. Abuddin Nata, *op. cit.*, h. 321-322.
 51. *Ibid.*
 52. *Ibid.*, h. 327.
 53. Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999, h. 84.
 54. Ramayulis, *op. cit.*, h. 354-356..

-
55. Abuddin Nata, *op. cit.*, h. 334.
 56. *Ibid.*, h. 334-335.
 57. *Ibid.*, h. 336-337.
 58. *Ibid.*, h. 337.
 59. *Ibid.*, h. 347.
 60. *Ibid.*, h. 356.
 61. *Ibid.*, h. 356-357.
 62. Departemen Pendidikan Nasional, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005.

DAFTAR PUSTAKA

- Ramayulis. *Sejarah Pendidikan Islam: Perubahan Konsep, Filsafat, dan Metodologi dari Era Nabi saw. sampai Ulama Nusantara*. Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- Asrorah, Hanum. *Sejarah Pendidikan Islam*. Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1992.
- Atria, Rahmi Putri. "Pendidikan Sosial Budaya Masyarakat Melayu Riau (Sebuah Warisan Kerajaan Siak Sri Indapura)," *Blog E=MC2*. <http://anjunofarofpki.blogspot.com/2013/07/pendidikan-sosial-budaya-masyarakat.html>. 3 Oktober 2014.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia; Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Hasymy, A. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Cet. III; [t.t.]: PT al Ma'arif, 1993.
- Islam, Menunggu Asingnya. "Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Islam di Indonesia," *Blog SALAAM* <http://ricky-diah.blogspot.com/2011/10/pendidikan-Islam-pada-masa-kerajaan.html> (3 Oktober 2014).
- Kurniawan, Davi. "Sejarah Tokoh-Tokoh Pendidikan di Indonesia dan Luar Negeri," *Kompasiana.com*, 23 November 2010. <http://sejarah.kompasiana.com/2010/11/23/sejarah-tokoh-tokoh-pendidikan-di-indonesia-dan-luar-negeri-320581.html> (7 Oktober 2014).
- al_Lumbuky, Yusran KHaidir. "Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Demak," *Blog Arsip Ilmu Pengetahuan*. http://jimmygeneh.blogspot.com/2012/03/pendidikan-Islam-pada-masa-kerajaan_13.html. 3 Oktober 2014.
- Maksum. *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*. Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Mattulada. *Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995.
- Nata, Abuddin. *Sejarah Pendidikan Islam*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011.
- Nizar, Samsul. *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007.
- _____. *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013.
- Online, Banten. "Pendidikan Islam di Zaman Penjajahan Belanda," *Blog Informasi Banten dan Dunia Pendidikan* <http://ensiklopedibanten.wordpress.com/2012/04/16/pendidikan-Islam-di-zaman-penjajahan-belanda/> (7 Oktober 2014)
- Mastuhu. *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999. Dikutip dalam Abuddin Nata. *Sejarah Pendidikan Islam*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011.
- Ramayulis. *Sejarah Pendidikan Islam: Perubahan Konsep, Filsafat, dan Metodologi dari Era Nabi saw. sampai Ulama Nusantara*. Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 2012.

-
- Saebani, Beni Ahmad dan Hendra AK. Hdiyati. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. II; Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Soemanto, Wasty. *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional, 1983.
- Tashadi *et al.* *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Yogyakarta*. Yogyakarta: Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- Wahab Fzh, Rochidin. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Wahyudi, Siswoyo. *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: 2001.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Mutiara, 1979.
- Zuhairini *et.al.* *Sejarah Pendidikan Islam*. Cet. VI; Jakarta: Bumi Aksara, 2000.